

IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA (PSKS) DI DESA SEKUDUK KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:
EVI UTARI
NIM. E01112057

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kajian Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

email: eviutari993@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Edward III yaitu dari aspek komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Langkah yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan serta mencari informasi melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) masih belum efektif. Hal ini karena minimnya penyebaran komunikasi yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui program simpanan keluarga sejahtera (PSKS). Aspek komunikasi seperti penyaluran informasi secara khusus di Desa Sekuduk tidak ada, hanya sekedar membagikan KKS. Selain itu, masyarakat penerima juga belum mengetahui kapan akan menerima dana tersebut, karena sampai saat informasinya belum jelas. Kemudian aspek sumber daya manusia kurang yaitu implementor dalam memonitor program simpanan keluarga sejahtera di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Belum cairnya dana program simpanan keluarga sejahtera sehingga masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum merasakan manfaatnya. Selain itu tidak tampak atau tidak adanya penyuluhan kepada masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Saran dari peneliti adalah perlunya pengawasan dari Kabupaten.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Keluarga Sejahtera.

PROGRAM IMPLEMENTATION THE PROSPEROUS FAMILY SAVINGS (PSKS) IN THE VILLAGE OF SEKUDUK SUB-DISTRICT OF SAMBAS REGENCY TO SEJANGKUNG PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

Abstract

This research aims to describe and analyze the implementation of the programme of the prosperous Family Savings (PSKS) in the village of Sekuduk sub-district of Sambas Regency to Sejangkung. As for the concept used in this study is the concept of Edward III from the aspect of communication, resources, bureaucratic structure and disposition. This research is descriptive research types by using a qualitative approach. The steps that researchers do in the research is to collect and find information through interviews, observation and documentation. The results of this research show that the prosperous Family Savings Program (PSKS) is still not effective. This is because of the lack of dissemination of communication that led to the public less prosperous family savings program knowing (PSKS). Aspects of communication such as channelling information specifically in the village of Sekuduk no, just simply share the KKS. In addition, the community recipient not knowing when it will receive these funds, because to date information unclear. Then the human resources aspect is less i.e. implementor in monitoring the prosperous family savings program in the village of Sekuduk sub-district of Sambas Regency to Sejangkung. Yet the liquid funds the prosperous family savings program so that the recipient's Family Prosperous Card society (KKS) have yet to feel the benefits. In addition doesn't look or absence of outreach to the community Prosperous Family Card recipients (KKS). The advice of researchers is the need for oversight of the district.

Keywords: Implementation, The Prosperous Family Savings Program, The Prosperous Family Card.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki kewajiban untuk menerapkan suatu kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Selain itu juga, pemerintah mempunyai kewajiban sebagai amanat amandemen UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Adanya Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Sehat (KIS) untuk Membangun Keluarga Produktif.

Selain inpres juga terdapat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 di atas. Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, Pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima program perlindungan sosial, salah satunya adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

Sebagai kebijakan yang relatif masih baru diresmikan pada 1 April 2015, yang dilaksanakan di seluruh Indonesia baik di seluruh kota maupun di pelosok desa, namun pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera masih kurang optimal sesuai dengan target yang hendak dicapai. Misalnya di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas yang berjalan belum efektif.

Peserta penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) khususnya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan bantuan dana. Jumlah peserta Penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk sebanyak 131 Kepala Keluarga (KK). Jumlah tersebut berdasarkan data Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Sekuduk tahun 2016.

Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) bertujuan untuk membantu Rumah Tangga Miskin dan rentan yang terkena dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar mereka yang hidup didalam garis kemiskinan dapat terbantu. Namun seiring berjalannya program ini ada beberapa fenomena yang ditemui di lapangan, mulai dari komunikasi yang tidak efektif. Seperti belum terjadinya komunikasi yang efektif antara implementor dengan sasaran (*target group*). Karena penyaluran komunikasi

yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

Program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) sampai saat ini dananya belum juga cair. Sehingga informasi yang diterima akan pencairan dana itu tidak jelas dan membingungkan masyarakat yang menanti akan pencairan dana tersebut. Selain itu, dalam proses pendataan penerima dana kartu keluarga sejahtera yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hendaknya mengikutsertakan pemerintah setempat seperti kepala desa dan perangkatnya, sehingga terkesan transparan mengenai apa saja kriteria miskin yang menjadi acuan masyarakat yang berhak menjadi penerima KKS di Desa Sekuduk.

Setelah melakukan observasi dan wawancara dari masyarakat setempat terlihat bahwa proses pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera di Desa Sekuduk, minimnya penyebaran komunikasi yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui program simpanan keluarga sejahtera (PSKS). Masyarakat masih banyak belum tahu tentang program simpanan keluarga sejahtera. Minimnya penyebaran komunikasi menandai antara pihak pelaksana dengan masyarakat sangat merugikan masyarakat.

Lemahnya sumber daya manusia tampak dari kemampuan merencanakan

kegiatan, kemampuan komunikasi dan kemampuan mengorganisasikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan program. Sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program berjalan apa adanya saja, tidak tepat sasaran, tidak memberdayakan dan tidak menghasilkan manfaat yang besar bagi masyarakat. Sehingga sumber daya manusia kurang yaitu implementor dalam memonitor program simpanan keluarga sejahtera di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.

Selain itu belum memenuhi tujuan dari program simpanan keluarga sejahtera. Seperti pemberian bantuan dana simpanan dari pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk memberdayakan dan melindungi masyarakat miskin. Hal ini dibuktikan dengan belum cairnya dana program simpanan keluarga sejahtera sehingga masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum merasakan manfaatnya. Dengan demikian disposisi dalam implementasi program simpanan keluarga sejahtera di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas belum efektif. Selain itu tidak tampak atau tidak adanya penyuluhan atau sebagainya kepada masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Melihat penjelasan di atas, proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan mulai dari

tahapan komunikasi, pelaksanaan kegiatan dan hasilnya belum maksimal peneliti ingin menggali lebih banyak informasi dan mengetahui lebih dalam mengenai program simpanan keluarga sejahtera ini dan implementasinya di Desa Sekuduk. Maka dari itulah, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat”.

Adapun jumlah kepala keluarga (KK) penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.

Tabel 1
Jumlah Kartu Keluarga (KK) Penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung

N o	Dusun	Rt/Rw	Jumlah Kk Penerima	Jumla h (Kk)
1	Karya Bakti	001/001	21	62
		002/001	21	87
2	Tri Sakti	003/002	16	63
		004/002	27	104
3	Sejiwa Sehati	005/003	27	115
		006/003	19	93
JUMLAH			131	524

Dusun Karya Bakti persentase tertinggi penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Sedangkan

persentase penerima PSKS yang terendah adalah Dusun Sejiwa sehati. Dengan demikian, jumlah data penerima PSKS pada Agustus 2016 di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Hal ini disebabkan rendahnya pendapatan kepala keluarga dalam memenuhi keperluan keluarganya. Sebagian besar pekerjaan penduduk di Desa Sekuduk adalah petani.

Selain itu, program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) yang diberikan dalam bentuk simpanan yang artinya seperti tabungan bantuan uang tunai yang diberikan dalam bentuk rekening bertujuan mengurangi antrean saat pengambilan, mendorong kegiatan produktif masyarakat, dan bagian strategi keuangan inklusif untuk penanggulangan kemiskinan. Dari bantuan PSKS masyarakat diharapkan menyisihkan sebagian dana yang digunakan secara produktif, seperti pemenuhan keperluan pokok. Adanya bantuan berupa Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), masyarakat kurang mampu di dorong agar bisa keluar dari jerat kemiskinan.

Peneliti ini bermaksud untuk mengetahui mengapa Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas belum efektif.

Adapun penelitian ini berdasarkan dari fokus permasalahan dalam penulisan adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mempengaruhi Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.

Tujuan dari penelitian ini, adalah: ingin menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Anderson (dalam Agustino, 2006: 7) mengartikan kebijakan publik sebagai “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Menurut R. Dye (dalam Santosa, 2009:27) dalam merumuskan kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Kebijakan publik juga memiliki empat sifat: regulatif, organisasional, distributif, dan ekstraktif. Kebijakan publik meliputi seluruh aspek yang dianggap penting bagi suatu negara untuk diatur.

Putra (2001: 80) mengemukakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada implementasinya.

Kebijakan publik dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang tumbuh dan kembang dalam kehidupan Masyarakat Desa. Untuk itu, Anderson (dalam Widodo, 2008:14) menentukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik, antara lain sebagai berikut:

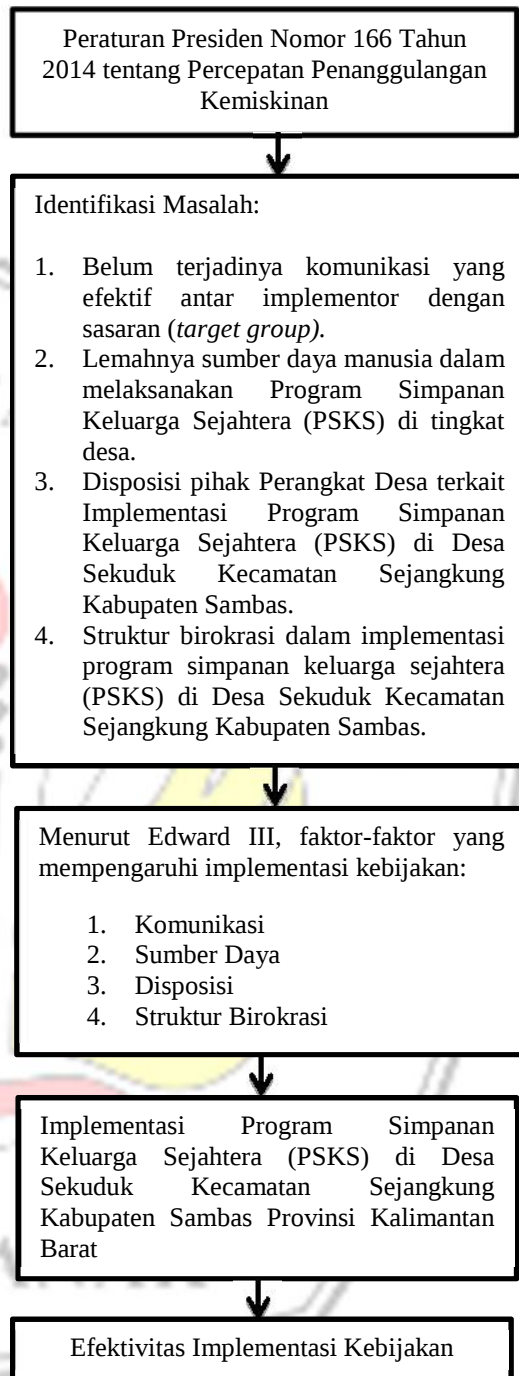
1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu
2. Kebijakan berisikan tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.

Model yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah model Edward III yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi

keberhasilan suatu implementasi ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Komunikasi, kebijakan dalam hal ini yang terpenting adalah kejelasan dan konsistensi informasi karena suatu kebijaksanaan akan berimplikasi pada banyak pihak, terutama komunikasi antara aparat pemerintah atau birokrasi yang menyelenggarakan kebijaksanaan.
2. Sumber daya manusia, adalah mereka yang melaksanakan pekerjaan, dimana keberhasilan pelaksanaan pekerjaan memerlukan jumlah dan kualitas sumber daya yang sesuai, memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta fasilitas yang memadai.
3. Disposisi, yaitu sikap dan komitmen pelaksana program atau birokrat terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan.
4. Struktur birokrasi, dimana harus mewadahi proses kerja organisasi bersangkutan dan pengaruh lingkungan (Iswono, 1996).

Gambar 1 Alur Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskriptifkan atau menggambarkan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung.

Adapun tahapan dalam analisis data penelitian ini menurut Sugiyono (2003: 264) yakni (1) *Data reduction* (reduksi data); (2) *Data display* (penyajian data); (3) *Conclusion / verification* (penarikan kesimpulan / verifikasi).

Teknik pengumpulan data lebih banyak wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi: reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Kemudian penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan terakhir verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas sumber data.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang diteliti, guna memperoleh data yang lebih konkret baik data primer maupun data sekunder, fakta dan informasi mengenai pelaksanaan diklat, jenis materi diklat, kemampuan dan perilaku baik sebelum maupun sesudah mengikuti diklat.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur dan buku-buku yang ada hubungannya dengan strategi pengembangan, khususnya teori, definisi dan konsep dari para ahli yang berkaitan dengan strategi pengembangan. Melakukan wawancara dengan subyek penelitian yaitu:
 1. Kepala Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.
 2. Masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.
 3. Masyarakat Desa Sekuduk bukan penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Keberhasilan komunikasi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu: transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Menurut Winarno (2007:176) ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. Pertama, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan ini akan menimbulkan hambatan-hambatan atau distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hierarki birokrasi. Seperti kita ketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkhis. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektifitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana. Ketiga, pada akhirnya penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan

suatu kebijakan. Kadang-kadang para pelaksana mengabaikan apa yang sudah jelas dan mencoba menduga-duga makna komunikasi yang sebenarnya.

Seperti halnya penyaluran informasi di Desa Sekuduk hanya membagikan kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada masyarakat penerima Program simpanan keluarga sejahtera (PSKS). Bahkan KPS belum ditukar oleh masyarakat dengan KKS, akan tetapi KKS langsung diterima oleh masyarakat penerima tanpa menukarkan KPS. Juga tidak adanya penyampaian secara khusus mengenai program ini.

Dengan demikian, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi yakni adanya salah pengertian, hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

Faktor kedua yang dikemukakan Edwards (Winarno, 2007: 177), adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana-pelaksana

kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Kejelasan komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Dengan demikian, ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu juga ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Sumber Daya

Menurut Winarno (2002 : 512) bahwa sumber daya berkaitan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Sumber daya dalam implementasi merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan dalam penunjang pelaksanaan program.

Implementasi program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk dapat dikatakan kurang efektif, karena variabel sumber daya yang mempengaruhi program ini kurang memadai, terutama sumber daya tenaga. Dilihat dari pengimplementasian Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk perlu peninjauan kembali, pemerintah kabupaten Sambas harusnya mengevaluasi kembali karena masih ditemukan masyarakat yang harusnya menerima atau tergolong kurang mampu akan tetapi tidak mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sedangkan sebagian masyarakat yang dianggap mampu malah menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Data peserta penerima KKS harusnya juga di evaluasi karena kemungkinan orangnya sudah meninggal dunia, dan harusnya dipindahkan ke orang yang dianggap layak menerimanya.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan yaitu menyampaikan Informasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) kepada masyarakat.

Disposisi/ Sikap Pelaksana

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana (*implementors*) untuk melaksanakan kebijakan, Edward III (dalam Widodo, 2006: 104).

Adapun faktor mengenai disposisi yang mempengaruhi program simpanan keluarga sejahtera adalah belum terwujudnya tujuan dari program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk. Hal ini dibuktikan dengan belum cairnya dana program simpanan keluarga sejahtera sehingga masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum merasakan manfaatnya.

Seperti halnya sikap dan komitmen pelaksana program simpanan keluarga sejahtera atau aparat pemerintah atau birokrat terhadap kebijaksanaan yang sudah ditetapkan.

Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2006: 92) mengatakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. SOP (Standar Operasional dan Prosedur) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan

kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Adapun tugas kepala desa/lurah mendampingi PT. Pos dalam mendistribusikan KPS atau sekarang dengan KKS. Dalam mendampingi PT. Pos mendistribusikan KKS dengan adanya dampingan langsung dari pihak kelurahan yang diberikan tanggung jawab dari pihak kecamatan. Berkoordinasi dengan PT. Pos untuk memperoleh rekapitulasi (jumlah) kartu retur di Desa/ Kelurahan karena untuk rekapitulasi kartu data pihak kelurahan memiliki data yang akurat.

Selain itu, perangkat desa melakukan musyawarah Desa. Hal ini dilakukan untuk menetapkan nama Rumah Tangga Pengganti. Namun pada kenyataan di lapangan hal ini sulit untuk dilaksanakan.

Seiring dengan pemberian kewenangan dalam rangka melaksanakan tugas, harus disertai tanggung jawab yang jelas dalam menentukan siapa yang pantas untuk diberikan wewenang merupakan suatu kebijakan atasan ataupun lembaga. Dengan adanya pembagian tugas maka seseorang atau sekelompok orang akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyimpangan dan kekurangan yang dapat terjadi, sehingga kebijakan tersebut harus mempunyai dasar yang kuat dan relevan sesuai fakta.

E. KESIMPULAN

Berbagai pemaparan tentang implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas yang telah peneliti jabarkan diatas, setelah peneliti analisis dengan menggunakan teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dapat ditarik beberapa kesimpulan faktoryang paling dominan mempengaruhi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yaitu sebagai berikut :

1. Komunikasi

Faktor dominan yang mempengaruhi Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas adalah minimnya penyebaran komunikasi yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui program simpanan keluarga sejahtera (PSKS). Penyebaran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik. Selain penyaluran atau transmisi dalam komunikasi juga terdapat kejelasan yakni komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkanserta konsistensi yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus

konsisten dan jelas untuk ditetapkan dan dijalankan.

2. Sumber Daya

Selain komunikasi faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu sumber daya yang terbagi menjadi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan dalam menunjang pelaksanaan program. Namun faktor dominan yang mempengaruhi Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas adalah sumber daya manusia kurang yaitu implementor dalam memonitor program simpanan keluarga sejahtera di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Hal ini dibuktikan dari menjalankan tanggung jawab, misalnya pekerjaan tidak semua sumber daya manusia atau apatur menguasai sesuai tugas dan fungsinya. Bahkan ada yang merangkap pekerjaan yang disebabkan kurangnya pengetahuan tentang teknologi.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh

sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Adapun faktor mengenai disposisi yang mempengaruhi program simpanan keluarga sejahtera adalah belum terwujudnya tujuan dari program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk. Hal ini dibuktikan dengan belum cairnya dana program simpanan keluarga sejahtera sehingga masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum merasakan manfaatnya. Dengan demikian disposisi dalam implementasi program simpanan keluarga sejahtera di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas belum efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Selain itu mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi. Adanya dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasi. Adapun faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas adalah tidak tampak atau tidak adanya penyuluhan atau sebagainya kepada masyarakat penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sehingga struktur birokrasi

dalam implementasi program simpanan keluarga sejahtera di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas belum efektif.

F. IMPLIKASI

Implikasi dari penelitian ini diharapkan semoga penelitian ini bukan penelitian yang pertama dan terakhir dilakukan. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dilanjutkan dan disempurnakan oleh penelitian selanjutnya, karena peneliti menyadari masih banyak aspek-aspek yang bisa digali maupun dikembangkan mengenai Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, penelitian yang dilakukan selama program ini diterapkan. Penelitian ini akan membantu pemerintah dalam melakukan *controlling* terhadap kebijakan atau program yang telah dibuat, peneliti memaparkan sekaligus menganalisis faktor penyebab belum optimalnya Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung.

Harapan lain yang peneliti harapkan dari laporan penelitian ini adalah bagi peneliti sendiri, penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran yang dapat

menambah wawasan keilmuan penulis terutama mengenai kebijakan publik, agar peneliti bisa melanjutkan pembelajaran mengenai kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah.

G. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran-saran sesuai dengan apa yang penulis dapatkan selama berada dilapangan. Berikut adalah saran-saran yang disampaikan:

1. Perlunya peninjauan terhadap pemutahira data yang telah meninggal dunia terhadap penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dalam pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) di Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas. Melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau pemerintah setempat, peninjauan langsung harus dilakukan di Desa Sekuduk. Agar mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program ini.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengerti dan mengetahui Program

Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) atau paham dengan kartu yang diterimanya yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

3. Diharapkan adanya pemutahiran data penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) terbaru oleh Pemerintah, sehingga penerima dana KKS lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin.
4. Diharapkan dalam proses pendataan penerima dana kartu keluarga sejahtera yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hendaknya mengikutsertakan pemerintah setempat seperti kepala desa dan perangkatnya, sehingga terkesan transparan mengenai apa saja kriteria miskin yang menjadi acuan masyarakat yang berhak menjadi penerima KKS di Desa Sekuduk. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam proses pendataan dan bisa tepat sasaran pada warga miskin.

H. KETERBATASAN PENELITIAN

Hal-hal yang menjadi kekurangan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti masih merasa kurang terampil dalam merangkai kalimat sehingga peneliti mengalami kesulitan menuangkan pemikiran-pemikiran

kedalam bentuk tulisan. Selain itu kurangnya pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah, kelemahan tersebut khususnya pada saat wawancara.

2. Subjek dalam penelitian khususnya Kepala Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung tidak terbuka secara detail dalam menyampaikan informasi, sehingga peneliti setidaknya hanya mengetahui 70% informasi yang berkaitan dengan pengimplementasian Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)

I. REFERENSI

Buku-buku:

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- AR, Mustopadidjaja, 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kerja, Lembaga Administrasi Negara*. Jakarta : Duta Pertiwi Foundation.
- Bungin, B.(2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Danim, S.(2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: Pustaka Setia.
- Denzin, N. K & Lincoln, Y. S.(2009), *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indiahono, D.(2009). *Perbandingan Adm.Publik: Model, Konsep Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Islamy M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mazmanian, D.A. dan Sabatier, P.A.. 1983.*Implementation and Public Policy*.USA, London : Scott Foresman and Company.
- Moleong, L. J (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra, F. (2001). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Satori, D. & Komariah, A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Subarsono, A.G. (2005). *Analisis Kebijakan publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik dan Transparans Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Evi UTARI
NIM / Periode lulus : E01112057
Tanggal Lulus : 5 Mei 2017
Fakultas/ Jurusan : ISIP/ Ilmu Administrasi
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : eviutari993@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Program simpanan keluarga berjamaah (PKBJ) di Desa
Sekuduk Kecamatan Tanjungkuy Kabupaten Damar Provinsi Kalimantan
Barat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

☐ Secara *fulltex*

☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal

Perdi S. S. M. AB

NIP. 0197209052002121003

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 12/6/2017

Evi UTARI
NIM. E01112057

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)